

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN
KELUARGA DI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*



AULIA RIZKI AKBAR
2012/1207324

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGRI PADANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN
KELUARGA DI SUMATERA BARAT

Nama : Aulia Rizki Akbar
NIM/TM : 1207324/2012
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Fakultas : Ekonomi

Padang, 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Mike Triani, SE, MM
NIP. 19840129 200912 2 2002

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Drs. Ali Anis, M.S
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

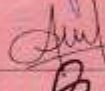
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN
KELUARGA DI SUMATERA BARAT**

Nama	: Aulia Rizki Akbar
NIM/BP	: 1207324/2012
Jurusan	: Ilmu Ekonomi
Keahlian	: Ekonomi Sumber Daya Manusia
Fakultas	: Ekonomi

Padang, April 2019

Tim Penguji :

Nama		Tanda Tangan
1. Mike Triani, SE, MM	(Ketua)	
2. Ariusni, SE, M.Si	(Anggota)	
3. Drs. Ali Anis, MS	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: Aulia Rizki Akbar
NIM/Tahun Masuk	: 1207324/2012
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang / 04 Januari 1995
Jurusan	: Ilmu Ekonomi
Keahlian	: Ekonomi Sumber Daya Manusia
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Komplek Mega Permai 1, Blok A4 No.12, Lh.buaya
No. HP / Telepon	: 085364577167
Judul Skripsi	: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga di Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 2019
Yang menandatangani,



Aulia Rizki Akbar
NIM.1207324/2012

ABSTRAK

Aulia, 2012/1207324. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga di Sumatera Barat. Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, dengan dosen pembimbing (1) Bapak Drs. Akhirmen, M.Si dan dosen pembimbing (2) Ibuk Mike Triani, SE, MM

Kesejahteraan pada hakekatnya adalah dapat terpenuhinya kebutuhan (pangan, sandang, dan papan) yang harus dipenuhi dengan kekayaan atau pendapatan yang dimiliki. Kesejahteraan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, beberapa diantaranya adalah usia kawin pertama, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga di Sumatera Barat. Melihat fenomena yang umumnya terjadi, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh usia kawin pertama, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan terhadap kesejahteraan keluarga di Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan data Susenas tahun 2016. Populasi penelitian adalah rumah tangga di Sumatera Barat. Sampel yang digunakan sebanyak 9455 kepala rumah tangga. Sampel yang diambil tersebar di 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji Wald dengan taraf nyata 5%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terlihat bahwa usia kawin pertama, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga di Sumatera Barat.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, walaupun dengan kesederhanaan dan keterbatasan yang ada dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga di Sumatera Barat”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Disamping itu juga untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang dapat berguna bagi masyarakat.

Dalam Penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada kedua orang tua Penulis, yang selama ini telah memberikan dorongan, semangat serta Doa demi kelancaran penulisan ini. Selain itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Akhirmen, M.Si selaku pembimbing I dan Ibuk Mike Triani, SE, MM selaku pembimbing II yang telah menuntun serta membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Bapak Prof. Dr. Idris, M.Si serta para Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Drs. Alianis, M.Si selaku Ketua Program Studi dan Ibu Melti Roza Adry, S.E, M.E selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada ibu Ariusni, SE., M.Si dan ibu Yewiwati, SE, ME yang telah bersedia menguji dan memberikan masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha yang memberikan kelancaran serta Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan bacaan.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Sumatera Barat yang telah membantu kelancaran bagi penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan bagi penyelesaian skripsi ini.
7. Rekan – rekan seperjuangan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2012 yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan teristimewa penulis persembahkan kepada Ibunda dan Ayahanda Tercinta beserta Adik yang sangat penulis sayangi dimana telah banyak memberikan kesungguhan Do'a dan bantuan Moril serta materil pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Amin.

Padang, Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	9
1. Konsep Kesejahteraan.....	9
2. Usia Kawin Pertama.....	17
3. Pekerjaan.....	19
4. Pendidikan.....	22
5. Kesehatan	24
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Konseptual	31
D. Hipotesis.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Variabel Penelitian	34
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Defenisi Operasional.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	42
B. Deskripsi Variable Penelitian.....	44
C. Analisis Induktif.....	49
D. Pembahasan.....	54

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Tahun 2012-2016.....	4
2. Perkembangan Pengeluaran Rumah Tangga, Perkawinan, Pekerjaan, Pendidikan dan Kesehatan di Sumatera Barat Tahun 2012-2016	5
3. Perkembangan Pengeluaran Rumah Tangga dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat Tahun 2012-2016	7
4. Variabel dan Skala Pengukuran Data Analisa Logistik	41
5. Perkembangan Penduduk Miskin di Sumatera Barat Tahun 2016.....	43
6. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut jenis pengeluaran di Sumatera Barat tahun 2015-2016.....	44
7. Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	46
8. Usia Kawin Pertama di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016.....	47
9. Lapangan Pekerjaan Utama di Sumatera Barat pada tahun 2016	48
10. Pendidikan di Sumatera Barat pada tahun 2016	49
11. Tingkat Keluhan Kesehatan di Provinsi Sumatera barat tahun 2016.....	50
12. Hasil Pendugaan Parameter dan ODD Ratio Regresi Logistik Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga di Sumatera Barat Tahun 2016.....	51
13. Koefisien Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	32

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan masyarakat sangat tergantung kepada kehidupan keluarga yang menjadi bagian inti dari masyarakat itu, sehingga keluarga memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional serta menjadi tumpuan dalam pembangunan manusia seutuhnya. Masalah yang kita hadapi saat ini masih banyaknya keluarga di Indonesia ini yang berada dalam kondisi prasejahtera, adalah kewajiban kita semua untuk meningkatkan mereka sehingga mencapai keluarga sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya pembinaan keluarga dari berbagai aspek kehidupan.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif. Berdasarkan data BPS (2016), masih terdapat sekitar 28 juta orang atau 10,8% penduduk yang tinggal di bawah garis kemiskinan atau mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan pokoknya.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, Pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Sama halnya

jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi.

Memahami konsep kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi absolut (kesejahteraan ekonomi) semata. Bervariasinya konsep kesejahteraan dimasyarakat dapat berarti bahwa kesejahteraan memiliki pemahaman yang bersifat relatif. Konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup masyarakat, dimana kualitas hidup masyarakat dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik maupun ekonomi masyarakat tersebut. Disimpulkan bahwa pengertian ukuran kesejahteraan awalnya hanya diukur melalui aspek fisik dan *income* saja, namun berkembangnya zaman saat ini kesejahteraan diukur melalui beberapa indikator-indikator seperti kesehatan, pendidikan dan sosial ekonominya.

Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran saja, melainkan juga harus secara keseluruhan sesuai dengan ketentraman yang berarti dengan kemampuan itulah dapat menuju keselamatan dan ketentraman hidup. Keluarga sejahtera adalah dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, memiliki hubungan yang sama, selaras, seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Teori-teori ekonomi sering mengaitkan antara tingginya tingkat kesejahteraan dengan kualitas hidup yang semakin tinggi pula. Semakin tinggi pendapatan akan menyebabkan semakin tinggi pula kesejahteraan yang dilihat dari besarnya

konsumsi mereka melalui pemahaman tersebut teori kesejahteraan hanya terpaku pada pemenuhan kebutuhan konsumsi makanan saja, dimana dikatakan menurut:

Kesejahteraan ekonomi keluarga, diukur dalam pemenuhan akan input keluarga (pendapatan, upah, aset dan pengeluaran) sementara kesejahteraan materiil diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga. Dalam sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan erat dengan besaran pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan dan dikeluarkan sebagai bentuk konsumsi untuk mencapai kesejahteraan.

Kesejahteraan pada hakekatnya dapat terpenuhinya kebutuhan (pangan, sandang, dan papan) yang harus dipenuhi dengan kekayaan atau pendapatan yang dimiliki. Dalam kehidupan keluarga di masyarakat sekarang ini, masih banyak keluarga yang belum terpenuhi kesejahteraannya. Misalnya kesejahteraan ekonomi yang belum terpenuhi karena pendapatan suami rendah, tidak mencukupi kebutuhan pokok. Anak yang tidak bersekolah karena orang tua tidak mempunyai biaya. Permasalahan seperti itu akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dalam keluarga. Dalam hal ini, anggota keluarga dituntut untuk dapat mengatasi masalah tersebut.

Tabel.1 Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Tahun 2012-2016

Provinsi	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	Rata- rata
Aceh	18.58	17.72	16.98	17.11	16.43	86.82
Sumatera Utara	10.41	10.39	9.85	10.79	10.27	51.71
Sumatera Barat	8	7.56	6.89	6.71	7.14	36.3
Riau	8.05	8.42	7.99	8.82	7.67	40.95
Jambi	8.28	8.42	8.39	9.12	8.37	42.58
Sumatera Selatan	13.48	14.06	13.62	13.77	13.39	68.32
Bengkulu	17.51	17.75	17.09	17.16	17.03	86.54
Lampung	15.65	14.39	14.21	13.53	13.86	71.64
Kepulauan Bangka Belitung	5.37	5.25	4.97	4.83	5.04	25.46
Kepulauan Riau	6.83	6.35	6.4	5.78	5.84	31.2

Sumber: Badan Pusat Statistik 2012-2016

Pada Tabel.1 dapat dilihat persentase penduduk miskin di Sumatera. Sumatera Barat berada pada posisi tiga terendah setelah Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, dari Tabel diatas persentase kemiskinan Sumatera Barat terlihat menurun dari tahun 2012-2015, dan meningkat pada tahun 2016.

Tingkat kesejahteraan keluarga di Sumatera Barat dapat dilihat melalui pengeluaran rumah tangga, perkawinan, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Berikut data pengeluaran rumah tangga, perkawinan, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan selama 5 tahun terakhir di Sumatera Barat:

Tabel 2. Perkembangan Pengeluaran Rumah Tangga, Perkawinan, Pekerjaan, Pendidikan dan Kesehatan di Sumatera Barat Tahun 2012-2016

Tahun	Variabel				
	Rata-rata Pengeluaran rumah tangga	Perkawinan (%)	Pekerjaan (Jiwa)	Pendidikan (%)	Kesehatan (%)
2012	Rp 696.413	55.23	2.085.483	8.27	29,97
2013	Rp 768.446	55.04	2.061.109	8.28	29,43
2014	Rp 800.516	55.99	2.180.336	8.29	31,80
2015	Rp 894.703	55.68	2.184.559	8.42	28,92
2016	Rp 985.025	54.93	2.347.911	8.59	29,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2012-2016

Pada Tabel 2 dapat dilihat rata-rata pengeluaran per-kapita rumah tangga per bulan dalam satu tahun di Sumatera Barat, persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang telah kawin di Sumatera Barat, jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Sumatera Barat, rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat dan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan di Sumatera Barat.

Berdasarkan data pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa, fluktuasi yang terjadi pada variabel perkawinan tidak diiringi oleh variabel rata-rata pengeluaran rumah tangga, hal ini disebabkan variabel perkawinan memiliki rentang usia, apabila dalam satu tahun tingkat perkawinan yang berada pada rentang usia ideal lebih banyak dibandingkan selain usia ideal maka pengeluaran rumah tangga akan tetap tinggi. Pada variabel pekerjaan fluktuasi yang terjadi juga tidak diiringi oleh variabel pengeluaran rumah tangga, karena tidak semua pekerjaan memiliki tingkat penghasilan yang sama, penghasilan yang diperoleh tergantung kepada jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan. Pada variabel pendidikan peningkatan terjadi setiap

tahun, hal ini juga terjadi di variabel pengeluaran rumah tangga, karena pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sdm, semakin tinggi tingkat pendidikan maka kualitas sdm akan semakin baik, semakin baik kualitas sdm maka pendapatan yang diterima akan semakin banyak, semakin banyak pendapatan semakin tinggi pengeluaran. Pada variabel kesehatan terlihat adanya fluktuasi, namun hal itu tidak terjadi pada variabel pengeluaran rumah tangga, karena seseorang yang memiliki keluhan kesehatan bukan berarti tidak memiliki pendapatan, namun hal itu tentu saja mempengaruhi produktifitas orang tersebut. Apabila dilihat dari semua variabel bebas terhadap variabel bebas, terlihat bahwa tingginya pembangunan ekonomi di bidang kesehatan akan berpengaruh kepada kualitas SDM. Kualitas SDM yang baik tercermin dari tingginya angka rata-rata lama sekolah, yang menyebabkan naiknya jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja, akan tetapi persentase usia perkawinan menurun disebabkan naiknya kualitas SDM di Sumatera Barat, karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka seseorang lebih cenderung meningkatkan karir dari pada menikah di usia muda. Kecenderungan masyarakat yang lebih mengutamakan karir daripada menikah muda terlihat dari tingginya rata rata pengeluaran rumah tangga di Sumatera Barat.

Tabel 3. Perkembangan Pengeluaran Rumah Tangga dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat Tahun 2012-2016

Tahun	Pengeluaran Rumah Tangga (Rp)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2012	Rp.696.413	8.00
2013	Rp.768.446	7.56
2014	Rp.800.516	6.89
2015	Rp.894.703	6.71
2016	Rp.985.025	7.14

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2012-2016

Pada Tabel 3 dapat dilihat pada tahun 2016 persentase penduduk miskin di Sumatera Barat meningkat, di tahun yang sama pengeluaran rumah tangga juga meningkat, seharusnya peningkatan pengeluaran rumah tangga diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan, karena peningkatan pengeluaran rumah tangga mencerminkan tingginya angka pendapatan, tingginya angka pendapatan,

Berdasarkan latar belakang maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga Di Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga di Sumatera Barat, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sejauhmana peluang meningkatnya kesejahteraan keluarga di Sumatera Barat disebabkan oleh usia kawin pertama?
2. Sejauhmana peluang meningkatnya kesejahteraan keluarga di Sumatera Barat disebabkan oleh pekerjaan?
3. Sejauhmana peluang meningkatnya kesejahteraan keluarga di Sumatera Barat disebabkan oleh pendidikan?
4. Sejauhmana peluang meningkatnya kesejahteraan keluarga di Sumatera Barat disebabkan oleh kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peluang:

1. Meningkatnya kesejahteraan keluarga di Sumatera Barat yang disebabkan oleh usia perkawinan pertama.
2. Meningkatnya kesejahteraan keluarga di Sumatera Barat yang disebabkan oleh pekerjaan.
3. Meningkatnya kesejahteraan keluarga di Sumatera Barat yang disebabkan oleh pendidikan.

4. Meningkatnya kesejahteraan keluarga di Sumatera Barat yang disebabkan oleh kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu ekonomi sumber daya manusia.
3. Bagi Pemerintah, khususnya Pemda dan instansi terkait sebagai alat pengambilan keputusan kebijaksanaan untuk salah satu alternatif peningkatan kesejahteraan keluarga di Sumatera Barat.
4. Bagi peneliti lain, sebagai bahan acuan atau perbandingan serta tambahan wawasan berpikir dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan sosial termaktub dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1974 yang memberi definisi kesejahteraan sosial sebagai satu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materi maupun spritusl yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir daan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan socialyang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak dan kewajibanmanusia sesuai dengan pancasila. Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan 34 tentang kepedulian negarakepada kelompok lemah, menempatkan negara Negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan social.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, daan sosial warga negara agar daapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada waarga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karna belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermanfaat.

Menurut definisinya kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu (Suus, 2006). Menurut Suharto (2006:3) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

kesejahteraan menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tentu saja. Kesejahteraan sosial merupakan system yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesejahteraan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat (Suus, 2006:5).

Sedangkan definisi kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan menurut Durnah dalam Suus (2006:7), kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak,

kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial, pelayanan-pelayanan sosial kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan kesatu-satuan penduduk yang lebih luas, pelayanan-pelayanan ini meliputi perawatan, penyembuhan, dan pencegahan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan harus saling membantu, agar kehidupan ini berjalan selaras dan harmonis menciptakan suasana yang sejahtera.

Peningkatan pendapatan orang kaya (golongan menengah ke atas), seperti tuan tanah, politisi, pimpinan perusahaan, dan kaum elit lainnya akan digunakan untuk di belanjakan pada barang-barang mewah, emas, perhiasan, rumah yang mahal, bepergian ke luar negeri, atau menyimpan kekayaan di luar negeri dalam bentuk pelarian modal (*capital flight*). Sementara golongan menengah ke bawah yang memiliki karakteristik miskin, kesehatan, *gizi* dan pendidikan yang rendah, peningkatan pendapatan dapat meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan mereka. Peningkatan pendapatan ini juga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan seluruh perekonomian (Todaro, 2003:252).

Todaro (2006:250) ingin menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentasnya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan

cerminan daari peningkatan tingkat pendapatan maasyarakat golongan menengah kebawah.

Todaro (2006:250), kesejahteraan dispesifikan dan disederhanakan menjadi fungsi kesejahteraan W (*welfare*) dengan persamaan sebagai berikut:

$$W = W(Y, I, P)$$

Keterangan:

Y = Pendaapatan Perkapita

I = ketimpangan

P = Kemiskinan Absolut

Dimana Y adalah pendapatan perkapita. I adalah ketimpangan, dan P adalah kemiskinan absolut. Ketiga variabel ini mempunyai signifikasi yang berbeda-beda, dan selayaknya harus dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai kesejahteraan di negara-negara berkembang.

Berkaitan dengan fungsi persamaan kesejahteraan di atas, diasumsikan bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan perkapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan absolut dan tingkat ketimpangan. Semakin tinggi pendapatan perkapita seseorang maka dalam mengenyam pendidikan akan semakin tinggi karena dalam upaya pemenuhan pendidikan yang begitu mudah dicapai oleh seseorang jika pendapatan yang cukup atau lebih. Tetapi dalam masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan absolut sudah jelas. Tidak ada masyarakat beradap yang merasa nyaman dengan kondisi dimana rekan-rekan senegaranya berada dalam kesengsaraan absolut karena kemiskinan yang dideitanya. Mungkin karena alasan itulah setiap agama besar, selalu menekankan pentingnya bekerja untuk menanggulangi kemiskinan, dan juga merupakan salah satu alasan mengapa

bantuan pembangunan internasional didukung secara universal oleh setiap bangsa yang demokratis (Todaro, 2006:50).

Memahami konsep yang kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi absolut atau kesejahteraan ekonomi semata. Bervariasinya konsep kesejahteraan dimasyarakat dapat berarti bahwa kesejahteraan memiliki pemahaman yang bersifat relatif. Konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup masyarakat, dimana kualitas hidup masyarakat dapat dipenuhi oleh kondisi sosial politik maupun ekonomi masyarakat tersebut. Disimpulkan bahwa pengertian ukuran kesejahteraan awalnya hanya diukur melalui aspek fisik dan *income* saja , namun berkembang nya zaman saat ini kesejahteraan diukur melalui beberapa indikator-indikator seperti kesehatan, pendidikan dan sosial ekonominya.

Di dalam Buku IKRaR atau indeks kesejahteraan rakyat yang diterbitkan oleh menteri koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan merupakan konsep yang dapat dilihat dari banyak cara pandang, dan menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Berbagai definisi kesejahteraan dari berbagai cara pandang telah dihasilkan oleh para pakar. Ada yang melihat hanya dari satu sudut pandang sosial, ekonomi, ataupun politik. Sebagian besar ahli melihat kesejahteraan dari sudut pandang ekonomi. Tetapi seiring dengan perkembangan jaman, kesejahteraan tidak cukup hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi. Berbagai perkembangan terkini dan juga berbagai kajian menampakkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak berarti bahwa rakyat negara tersebut sejahtera.

Berangkat dari perkembangan terkini di dunia tentang kesejahteraan, maka ukuran yang dipakai adalah IKRaR yaitu merumuskan batasan kesejahteraan yang akan digunakan. Dengan mempertimbangkan konteks kekinian dan juga konteks se-Indonesia, maka cara pandang kesejahteraan yang digunakan dalam IKRaR dilihat dari dua sudut pandang, yakni: secara sektoral dan secara utuh.

Yang dimaksud dengan kesejahteraan sektoral adalah terpenuhinya hak dasar oleh orang perorang (individu), bukan oleh komunitas atau oleh negara. Misalnya, terpenuhnya hak atas pangan, sandang. Dengan kata lain, jika individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, maka ia dapat dikatakan sejahtera. Sedangkan kesejahteraan secara utuh adalah pemenuhan hak dasar oleh komunitas atau negara, dan tidak bisa hanya oleh orang per orang. Misalnya, terpenuhnya hak atas air bersih (air bersih harus disediakan oleh negara). Dengan kata lain, jika negara atau komunitas dapat memenuhi kebutuhan dasar warga negara (yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka sendiri), maka warga negara di negara tersebut dapat dikatakan sejahtera.

Selain itu, kesejahteraan juga dipandang dari rentang waktu. Berdasarkan rentang waktu, kesejahteraan dapat dilihat dari dua sisi, yakni: saat ini. Melihat kesejahteraan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kualitas hidup, dan masa depan. Kesejahteraan dilihat sebagai tujuan akhir, yaitu hidup yang bermartabat dan berdaulat.

Seiring dengan upaya pemerintah dalam pencapaian target MDGs, upaya kerjasama berbagai pemangku kepentingan juga melihat bahwa diperlukan suatu pengukuran untuk dapat melihat dan memastikan proses yang dilakukan saat ini mengarah pada pencapaian target yang disepakati dengan

melahirkan indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRaR). IKRaR merupakan suatu alat pengukuran yang dikembangkan untuk melihat relasi antara upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dimensi keadilan sosial, keadilan ekonomi serta demokrasi dan governance. Indeks kesejahteraan rakyat bernilai antara 0-100, dimana semakin tinggi nilai indeks semakin baik kondisi indeks kesejahteraan rakyat tersebut (Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat).

Setiap keluarga memiliki tujuan hidup yang ingin dicapai, seperti pendidikan anak yang baik, memiliki status sosial, mempunyai keluarga sakinah, memiliki tabungan, memiliki rumah dan lain-lain. Tujuan hidup tersebut sangat dipengaruhi jumlah anggota keluarga, usia, fisiologi, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, kepemilikan asset. (Iskandar, 2006).

Berdasarkan BKKBN kesejahteraan memiliki beberapa indikator yaitu;

a. Keluarga Pra Sejahtera (Sering dikelompokkan sebagai “sangat miskin”)

Belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

1) Indikator Ekonomi

- a) Makan dua kali atau lebih sehari
- b) Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian)

2) Indikator Non-Ekonomi

- a) Melaksanakan ibadah
- b) Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan

b. Keluarga Sejahtera I (Sering dikelompokkan sebagai “miskin”)

Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

1) Indikator Ekonomi

- a) Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur
- b) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru
- c) Luas lantai rumah paling kurang 8m untuk tiap penghuni

2) Indikator Non-Ekonomi

- a) Ibadah teratur
- b) Sehat tiga bulan terakhir
- c) Punya penghasilan tetap
- d) Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf
- e) Anak lebih dari 2 orang, ber-KB

c. Keluarga sejahtera II

Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

- 1) Memiliki tabungan keluarga
- 2) Makan bersama sambil berkomunikasi
- 3) Mengikuti kegiatan masyarakat
- 4) Rekreasi bersama 6 bulan sekali
- 5) Meningkatkan pengetahuan agama

- 6) Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
- 7) Menggunakan sarana transportasi

d. Keluarga sejahtera III

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:

- 1) Memiliki tabungan keluarga
- 2) Makan bersama sambil berkomunikasi
- 3) Mengikuti kegiatan masyarakat
- 4) Rekreasi bersama 6 bulan sekali
- 5) Meningkatkan pengetahuan agama
- 6) Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
- 7) Menggunakan sarana transportasi

Belum dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:

- 1) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
- 2) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan

e. Keluarga sejahtera III plus

Sudah dapat memenuhi indikator meliputi:

- 1) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
- 2) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan

2. Usia Kawin Pertama

Usia kawin adalah usia ketika seseorang memulai atau melangsungkan pernikahan (perkawinan pertama). Masalah pernikahan adalah merupakan salah satu bagian dari masalah kependudukan yang perlu ditangani secara serius, hal ini disebabkan karena pernikahan akan menimbulkan masalah baru dibidang kependudukan yang pada gilirannya akan menghambat pembangunan (Bkkbn, 2014:12).

Usia perkawinan pertama merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi tingkat produktifitas pada pasangan usia subur. Meningkatnya usia kawin akan dapat memberikan sumbangan pada penurunan angka kelahiran. Bagi masyarakat Indonesia, perkawinan dipandang sebagai perilaku yang bersifat universal dalam arti bahwa kebanyakan penduduk akan melangsungkan pernikahan. Salah satu ciri perkawinan Indonesia adalah pelaksanaan terjadi pada usia yang masih cukup muda terutama bagi wanita di pedesaan atau pinggiran kota (Bkkbn, 2014:12).

Usia perkawinan yang rendah bagi seorang wanita berarti akan memperpanjang masa untuk melahirkan. Seorang wanita mempunyai masa subur pada usia 15-49 tahun. Usia wanita saat perkawinan pertama dapat mempengaruhi resiko melahirkan. Semakin muda usia saat perkawinan pertama semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak, karena disebabkan belum matangnya rahim wanita usia muda untuk memproduksi anak atau belum siap mental dalam berumah tangga. Demikian

pula sebaliknya, semakin tua usia perkawinan pertama semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan atau melahirkan (Bkkbn, 2014:13).

Umur wanita ketika kawin pertama yang berarti saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara Usia Kawin Pertama (UKP) dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Hal ini berpengaruh pada tingkat fertilitas wanita dan penduduk secara umumnya. Semakin lama masa reproduksi wanita, maka kemungkinan wanita tersebut melahirkan banyak anak akan semakin besar. Dalam persoalan makro, hal ini akan menyebabkan meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk suatu daerah (Bkkbn, 2014:13).

Pernikahan tanpa adanya kesiapan usia dan pembekalan rentan terjadinya konflik, banyak keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka baik secara fisik maupun psikologis dan sosial. Sehingga tidak bisa membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera (Lestari, 2015).

Angka perkawinan pertama adalah angka yang menunjukkan banyaknya perkawinan pertama yang dilakukan pada satu tahun tertentu per 1.000 penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum pernah kawin (Adioetomo, 2011).

3. Pekerjaan

Jumlah atau besarnya penduduk umumnya dikaitkan dengan pertumbuhan *income per capita* suatu negara, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa penduduk yang besar adalah sangat menguntungkan bagi pembangunan ekonomi. Tetapi ada pula yang berpendapat lain yaitu bahwa justru penduduk yang jumlahnya sedikit yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi. Tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa jumlah penduduk suatu negara harus seimbang dengan jumlah sumber-sumber ekonominya, baru dapat diperoleh kenaikan pendapatan nasionalnya. Ini berarti jumlah penduduk tidak boleh terlampaui sedikit tetapi juga tidak boleh terlampaui banyak (Mulyadi, 2003).

Ada dua teori penting perlu dikemukakan dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan. *Pertama* adalah teori Lewis (1959) yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Teori kedua adalah teori Fei-Ranis (1961) yang berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri sebagai berikut: kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Struktur perekonomian suatu negara dapat dicerminkan dengan, antara lain

struktur lapangan pekerjaan utama, struktur jenis pekerjaan utama, dan status pekerjaan utama dari pekerjanya (Mulyadi, 2003).

Lapangan pekerjaan utama seseorang adalah bidang kegiatan utama pekerja tersebut. Lapangan pekerjaan utama biasanya digolongkan atas:

- a. Pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan,
- b. Listrik, gas, dan air,
- c. Bangunan,
- d. Perdagangan besar, eceran, rumah makan,
- e. Angkutan, pergudangan, dan komunikasi,
- f. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan dan tanah, serta jasa perusahaan,
- g. dan jasa kemasyarakatan.

Jenis pekerjaan utama seseorang adalah macam pekerjaan yang dilakukan pekerja tersebut. Jenis pekerjaan utama biasanya digolongkan atas:

- a. tenaga professional, teknisi dan sejenisnya,
- b. tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan,
- c. tenaga tata usaha dan tenaga yang sejenis,
- d. tenaga usaha penjualan,
- e. tenaga usaha jasa,
- f. tenaga usaha pertanian, perburuan dan perikanan,
- g. dan tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar.

Status pekerjaan utama seseorang adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan. Status pekerjaan utama bisanya terdiri atas:

- a. Buruh/karyawan adalah pekerja yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.
- b. Berusaha sendiri, bila pekerja tersebut bekerja atau resikonya sendiri, dan dalam usahanya tidak memperkerjakan orang lain.
- c. Berusaha dengan dibantu pekerja keluarga atau buruh tidak tetap.
- d. Pekerja keluarga, yaitu pekerja yang tidak mendapat upah, baik dalam bentuk uang maupun barang.
- e. Berusaha dengan buruh tetap, bila pekerja tersebut bekerja atas resiko sendiri, dan dalam melaksanakan usahanya dia memperkerjakan buruh tetap (Mulyadi,2003).

Kehidupan petani jauh dari kesan tentram dan sejahtera. Kesejahteraan tenaga kerja sektor industry melaju lebih cepat dibandingkan sektor pertanian, sektor pertanian adalah penyumbang kemiskinan yang signifikan, persentase penduduk miskin terbesar adalah bekerja di sektor pertanian (Sunarti, 2006).

4. Pendidikan

Peningkatan sumberdaya manusia merupakan bagian penting dalam pembangunan. Pada bidang pendidikan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia telah mendapat perhatian yang cukup besar. Salah satunya adalah menetapkan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar oleh pemerintah. Semua wajib belajar pendidikan dasar ditetapkan untuk waktu 6

tahun yang dimulai semenjak 1984. Kemudian sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar yang telah ditingkatkan menjadi 9 tahun yang dimulai tahun 1994.

Pendidikan merupakan investasi yang sangat berguna untuk membangun perekonomian.

Di satu pihak pendidikan membutuhkan waktu dan uang. Akan tetapi pada masa yang akan datang pendidikan yang telah diperoleh oleh masyarakat dan individu akan mendapatkan manfaat dari peningkatan taraf pendidikan. Dimana individu yang berpendidikan cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pendapatan yang diperoleh (Sukirno, 2006:443). Jadi menurut Sukirno pendidikan merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan pendapatan di masa yang akan datang. Dimana masyarakat yang berpendidikan cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi di bandingkan masyarakat yang tidak memiliki pendidikan. Dengan pendidikan yang tinggi seorang dapat memiliki pekerjaan yang lebih baik dan mapan dibandingkan masyarakat yang tidak berpendidikan.

Pendidikan merupakan hal mendasar untuk membantu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin kemajuan sosial dan ekonomi. Pendidikan adalah kunci dalam menciptakan, menyerap, dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Namun akses terhadap pendidikan tidak tersebar merata

dan golongan masyarakat miskin paling sedikit mendapat fasilitas pendidikan (Todaro,2004:404).

Pendidikan formal dan non formal berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung yaitu dengan perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka (Arsyad,2004:243). Menurut Arsyad pendidikan formal dan non formal dapat membantu mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang dengan pelatihan dan penyaluran yang diberikan kepada masyarakat miskin akan membantu meningkatkan keterampilan masyarakat miskin dimana keterampilan itu akan mendorong produktivitas mereka dalam bekerja yang akan mempengaruhi pendapatan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna mendapatkan dan memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang dan ikut serta dalam proses pembangunan. Dengan pendidikan yang terprogram dengan baik dan menjangkau semua golongan, maka pendidikan akan menjadi instrument yang paling efektif untuk memotong rantai kemiskinan di Indonesia. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap distribusi pendapatan. Di satu pihak untuk memperoleh pendidikan di perlukan waktu dan uang. Akan tetapi pada masa yang akan datang pendidikan yang telah diperoleh masyarakat dan individu akan mendapatkan manfaat dari

peningkatan taraf pendidikan. Dimana individu yang mendapatkan pendidikan cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan, maka semakintinggi pula pendapatan yang akan diperoleh (Sukirno, 2006:443). Jadi, semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin rendah distribusi pendapatan.

5. Kesehatan

Kesehatan yang baik merupakan faktor yang sangat penting dalam perekonomian. Perbaikan kesehatan mengembangkan perekonomian dalam 4 cara yaitu: menghilangkan produksi yang hilang akibat pekerjaan yang sakit, memungkinkan penggunaan sumber daya alam yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, karena adanya wabah/penyakit meningkat *enrollment* sekolah anak-anak dan juga membuat mereka lebih baik dalam menangkap pelajaran, memungkinkan penggunaan sumber daya manusia dan finansial yang ada untuk kepentingan yang lebih baik dari pada sekedar digunakan untuk mengobati penyakit. Jadi pekerja yang sehat akan memperoleh penghasilan yang lebih baik. Karena mereka lebih produktif dan mempunyai pekerjaan dengan bayaran yang lebih baik.

Menurut Todaro (2003:405) menyatakan bahwa kesehatan mempunyai peran sentral dalam pembangunan ekonomi karena kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, yang menjadi komponen pertumbuhan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat dalam peran penting pembangunan ekonomi.

Menurut WHO (*World Health Organizing*) dalam Todaro (2003:21) kesehatan banyak memyakit keadaan yang pada umumnya menunjukkan kesejahteraan fisik, mental dan sosial. Status kesehatan seseorang dikatakan baik kalau sekiranya setiap organ tubuh berfungsi secara layak dan cairan serta gas dalam tubuhnya mempunyai kandungan yang tepat perkembangan otot status gizi yang dimakan.

Selain efek positif langsungnya terhadap kesehatan nasional, kesehatan dasar juga merupakan cara yang efektif untuk mencapai pembangunan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Karena meskipun kedua orang tua mereka pekerja atau berwirausaha dan tidak teampil untuk cukup produktif namun jika mereka lemah, tidak sehat, dan tidak terampil untuk cukup produktif dalam menyokong kehidupan keluarganya maka anak-anak disuruh bekerja. Dimana kalkulasi manfaat investasi kesehatan harus selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang untuk melihat keadaan pembangunan ekonomi (Todaro, 2003: 453).

Menurut Schultz (dalam Jhingan, 2003:414) menyatakan bahwa pelayanan dan fasilitas kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi angka harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga serta vitalitas rakyat.

Pembangunan sosial ekonomi harus sejalan peningkatan kesehatan, karena dengan adanya peningkatan kesehatan masyarakat saja tanpa adanya memerangi kemiskinan akan memperlambat penurunan angka kematian di

masa akan datang yang memang sangat erat hubungannya dengan bidang kesehatan tersebut (BPS,2007).

Jadi dalam proses pembangunan sumber daya manusia, maka aspek kesehatan memegang peranan penting, karna itu dalam penunjang rendahnya angka kemiskinan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, pembangunan dalam bidang kesehatan harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah agar masyarakat sehat dan menjamin manusia yang sehat jasmani dan rohani.

Membicarakan kesehatan tidak hanya mempersoalkan pelayanan kesehatan saja, melainkan akan berkaitan dengan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pemerintah harus bertindak mengatur pasar komoditi kesehatan guna menghindarkan konsumen menanggung kerugian pasar akibat kesalahan dalam melakukan pemilihan konsumsi komoditi pelayanan kesehatan.

Menurut Todaro (2003: 404) kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, kesehatan juga dapat dilihat dari sebagai komponen pertumbuhan ekonomi dan pembangun ekonomi yang vital sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan sangat penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut WHO (dalam Todaro, 2004: 440) sehat itu meliputi sebuah kondisi kesejahteraan fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan fisik. Seseorang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan yang relatif lebih tinggi.

John Strauss dan Duncan Thomas (dalam Todaro, 2004:449) menemukan bahwa pria yang lebih tinggi dapat memperoleh penghasilan yang lebih banyak di Brazil, hal ini berarti jika tinggi badan merupakan indikator kesehatan maka peningkatan kesehatan dapat menyebabkan produktivitas yang lebih tinggi. Jadi, perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Produktivitas yang tinggi menyebabkan pendapatan yang mereka terima akan lebih besar.

Atmawikarta (2008) Keterkaitan antara kesehatan dan pembangunan :

Pertama, Kesehatan dan Pembangunan

Pada tingkat mikro yaitu pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih enerjik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Keadaan ini terutama terjadi di negara-negara sedang berkembang, dimana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih bekerja secara manual. Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (*input*) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Negara – Negara dengan kondisi kesehatan dan pendidikan yang rendah, menghadapi tantangan yang lebih berat untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan jika dibandingkan dengan negara yang lebih baik keadaan kesehatan dan pendidikannya.

Kedua, Kesehatan dan Kemiskinan

Berbagai indikator kesehatan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi memperlihatkan bahwa angka kesakitan dan kematian secara kuat berkorelasi terbalik dengan pendapatan. Tujuan pembangunan millennium difokuskan terhadap pengangguran kemiskinan pada umumnya dan beberapa tujuan kesehatan pada khususnya, sehingga terdapat keterkaitan antara upaya keseluruhan penurunan kemiskinan dengan investasi di bidang kesehatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, modal manusia (*human capital*) berupa pendidikan dan kesehatan merupakan komponen utama dalam meningkatkan kesejahteraan. Antara pendidikan dan kesehatan sangat erat kaitannya, manusia dengan pendidikan yang lebih tinggi akan mendapatkan pendapatan yang tinggi. Dengan pendapatan yang tinggi manusia akan memperbaiki kualitas hidup dengan mengonsumsi makanan bergizi sehingga kesehatannya tetap terjaga. Kesehatan yang baik akan memperlancar kegiatan dalam memperoleh pendidikan dan dalam bekerja, sehingga manusia dengan pendidikan dan kesehatan yang baik akan memiliki produktivitas yang tinggi sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan ataupun lembaga tempat mereka bekerja.

B. Penelitian Terdahulu

Astiana Widyastuti (2012). Analisis hubungan antara produktivitas pekerja dan tingkat pendidikan pekerja terhadap kesejahteraan keluarga di Jawa Tengah tahun 2009. Penelitian ini menunjukkan bahwa produktivitas pekerja berpengaruh positif karena dapat berpengaruh secara langsung

terhadap kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pendapatan yang diukur melalui pembagian upah dan jam kerja. Sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan keluarga karena dalam jangka pendek manfaat yang didapat dari pendidikan tinggi belum terlihat. Secara bersama-sama maupun parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan.

Muflikhati, dkk (2010). Kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan keluarga: kasus di wilayah pesisir Jawa Barat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal umur ayah dan ibu, total aset, dan pengeluaran perkapita pada keluarga nelayan dan bukan nelayan. Akan tetapi, keluarga nelayan memiliki jumlah anggota keluarga dan pendapatan perkapita yang lebih besar secara signifikan daripada keluarga bukan nelayan. Sebaliknya, pendidikan ayah dan pendidikan ibu pada keluarga nelayan lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan ayah dan ibu pada keluarga bukan nelayan. Jika kesejahteraan keluarga diukur hanya dari aspek ekonomi, maka keluarga nelayan lebih sejahtera dibandingkan dengan keluarga bukan nelayan. Sebaliknya, jika kesejahteraan diukur dengan berbagai dimensi kehidupan, maka keluarga nelayan lebih rendah tingkat kesejahteraannya.

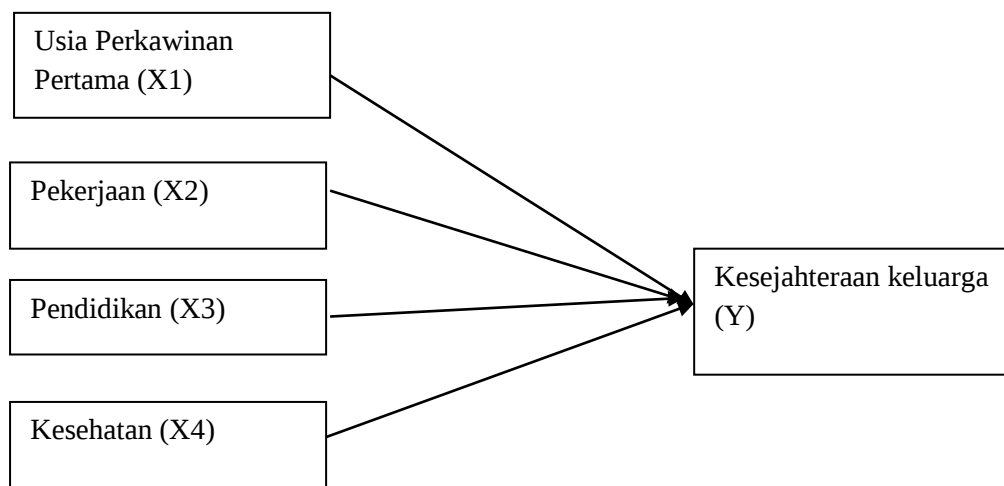
Meda Wahini, M (2016). Faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan keluarga di desa Pucanglaban Kecamatan Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kesejahteraan keluarga (objektif dan subjektif) dalam tingkatan baik; 2) faktor besar keluarga, pendapatan dan orang tua berpengaruh nyata pada kesejahteraan

keluarga; sedangkan umur, pendidikan, pekerjaan dan kepemilikan asset tidak mempengaruhi kesejahteraan keluarga.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi antara variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah dengan berpijak pada kajian teori di atas. Ketertarikan variabel yang diteliti adanya hubungan antara usia kawin pertama (X_1), pekerjaan (X_2), pendidikan (X_3), kesehatan (X_4), kesejahteraan keluarga (Y) sebagai variabel terikat.

Untuk lebih jelasnya dapat diketahui bahwa pengaruh variabel bebas usia kawin pertama (X_1), pekerjaan (X_2), pendidikan (X_3), kesehatan (X_4), kesejahteraan keluarga (Y) tersebut dapat digambarkan pada kerangka konseptual berikut



Gambar 1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

1. Usia Kawin Pertama berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Keluarga di Sumatra Barat.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Keluarga di Sumatera barat.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Keluarga di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Keluarga di Sumatera Barat

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_4 \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas terhadap variabel terikat seperti yang telah dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Usia kawin pertama berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Ketika kepala keluarga menikah pada usia yang produktif akan mengalami kematangan dalam menikah, sehingga akan berdampak pada kesejahteraan keluarga.
2. Pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Ketika kepala keluarga bekerja pada sektor formal, maka kemungkinan untuk memiliki keluarga yang sejahtera akan lebih besar dibandingkan dengan kepala keluarga yang bekerja pada sektor informal.
3. Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Ketika kepala keluarga berpendidikan diatas SLTA sederajat, maka kemungkinan memiliki keluarga yang sejahtera akan lebih besar dibandingkan dengan kepala keluarga yang berpendidikan dibawah SLTA sederajat.
4. Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Kepala keluarga dengan keluhan kesehatan memiliki keluarga yang lebih sejahtera dibandingkan dengan yang tidak memiliki keluhan kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan demi meningkat kualitas sumber daya manusia.
2. Pemerintah harus memperluas lapangan pekerjaan di bidang formal, dan lebih memperhatikan lapangan kerja informal (pertanian). Sehingga akan berdampak kepada tingginya pendapatan yang berimplikasi kepada naik kemampuan dalam memenuhi kebutuhan.
3. Seseorang yang ingin berumah tangga hendaknya lebih memperhatikan kematangan usia, karena kematangan usia sangat mempengaruhi seseorang dalam berfikir dan bertindak. Seseorang yang menikah pada usia produktif akan mempengaruhi kesejahteraan keluarga.
4. Pemerintah harus memperhatikan layanan kesehatan yang merata, sehingga orang yang kurang dari segi ekonominya bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat*. Yogyakarta:STIE YKPN.
- Atmawikarta. 2008. *Investasi Kesehatan Untuk Pembangunan Ekonomi*. Jakarta:Bappenas
- Badan Pusat Statistik. ***Indonesia Dalam Angka*** 2012-2016 BPS Sumatera Barat. Sumatera Barat.
- Bkkbn. 2014. Kajian Faktor Sosial Ekonomi Yang Berdampak Pada Usia Kawin Pertama di Provinsi Gorontalo
- E Sunarti, A Khomsan, 2006. *Kesejahteraan Keluarga Petani Mengapa Sulit Diwujudkan?*. Jurnal, Bogor:Institut Pertanian Bogor
- Hardianto. 2017, *Pengaruh Ekonomi Terhadap Pendidikan dan Peran Pendidikan Membangun Ekonomi*. Jurnal Pendidikan Islam, Pengaraian: Universitas Pasir Pengaraian
- Herawati, Tyas 2017. *Kualitas Pernikahan dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda*. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Iskandar, dkk, 2006. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga, Jurnal, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara
- Jhingan. 2003. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Lestari. 2015. *Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga*. Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan, Jakarta Timur: Universitas Negeri Jakarta
- Muflikhati, dkk, 2010. *Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga: Kasus Di Wilayah Pesisir Jawa Barat*, Jurnal, Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Ndakularak, 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Bali: Universitas Udayana
- Qoyyimah. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga Di Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung*, Jurnal, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya